

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat menjadi BUMDes merupakan suatu lembaga/usaha yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa.

Definisi BUMDes Menurut (Maryunani, 2008) :

“BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”.

Jadi BUMDes merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba).

BUMDes merupakan suatu lembaga yang dipercaya sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha, menambah wawasan masyarakat desa baik dengan cara mengembangkan potensi desa maupun memanfaatkan sumber daya alam desa. BUMDes dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (Warga Desa).

Keberadaan BUMDes secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta untuk memperkuat perekonomian desa, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat dengan adanya BUMDes, desa diberikan hak penuh untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa tanpa intruksi dari pemerintah dan kelompok tertentu. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat desa dituntut untuk mandiri. Dalam hal ini untuk menopang sifat kemandirian dari pemerintah dan masyarakat desa maka diperlukan prinsip-prinsip *kooperatif, partisipatif dan emansipatif, transparansi, serta sustainable* agar BUMDes dapat dijalankan dengan baik dan optimal, selain itu harus didasarkan oleh kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak serta kemampuan setiap anggota untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi dan konsumen.

Terciptanya Badan Usaha Milik Desa dikarenakan, sudah dititik beratkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai lembaga komersial dengan institusi sosial ekonomi BUMDes harus mampu berkompetensi ke luar desa serta harus berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi produktif maupun konsumtif dengan pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa, yakni hal ini mampu diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan seperti harga yang lebih murah dan mudah didapatkan dan lebih menguntungkan, tetapi dalam hal ini BUMDes harus tetap memperhatikan

efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan yang berlaku sebagai lembaga keuangan mikro.

Menurut Purnomo (Purnomo, 2004) maksud dan tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni :

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

1. Menumbuhkembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat desa
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa.

Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
2. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dan unit-unit usaha desa.
3. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
4. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha desa masyarakat yang berpenghasilan rendah.

B. Keberadaan BUMDes sebagai Penguatan Ekonomi Desa

BUMDes sebagai lembaga pengembangan potensi desa diperkirakan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. UU No. 6 tahun 2014 tentang payung hukum yang diberikan desa atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara substansial, UU No. 6 tahun 2014 mengerakkan sekaligus mendorong desa untuk pemenuhan pelayanan desa kepada masyarakat dengan subjek pembangunan. Keberadaan BUMDes menjadi suatu lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. Mengingat BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang bermodal usaha, yaitu sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa memang sudah berhasil mengatur rumah tangga sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah.

Untuk mengetahui seberapa jauh BUMDes berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, beberapa indikator kemajuan ekonomi yang harus diperhatikan. Daerah dapat dikatakan maju atau tidak, ditinjau dari keadaan ekonomi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi perkembangan dapat dilihat dari parameter-parameter (Farida, 2011) berikut :

1. Pendapatan per kapita
2. Tingkat Pertumbuhan ekonomi

3. Kegiatan perekonomian utama
4. Ketersediaan modal
5. Pemanfaatan SDA
6. Pertumbuhan penduduk
7. Kepadatan penduduk
8. Tingkat pengangguran
9. Keadaan sosial budaya
10. Kemajuan teknologi

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan perekonomian desa, Menurut (Seyadi, 2003) adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

C. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk wujud nyata keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan daerah. Dimana partisipasi masyarakat ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur bagi suatu daerah untuk mengembangkan dan mengetahui sejauh mana daerah bisa menggali potensi yang ada pada daerahnya. Keikutsertaan masyarakat ini harus diapresiasi dan didukung baik oleh pemerintah dalam membawa iklim demokratis, sehingga dengan hal tersebut masyarakat akan merasa benar-benar terlibat dalam program-program daerah.

Partisipasi nyata masyarakat merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah dengan tujuan untuk meringankan beban program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dapat dikatakan sukses apabila masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung dan program pembanguan tersebut bersifat berkelanjutan dan diharapkan juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada pada daerah tersebut maupun sekitarnya.

Pada pernyataan (Ife & Tesoreino, 2008) bahwa partisipasi dikategorikan dalam dua bentuk, yakni partisipasi sebagai cara dan partisipasi sebagai tujuan. Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi dan berimplikasi pada penggunaan partisipasi dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi sebagai cara, lebih menekankan pada capaian tujuan bukan pada kegiatan/program partisipasi itu sendiri dan masyarakat digerakan atau dilibatkan untuk meningkatkan efisiensi sistem penyampaian. Pada

umumnya partisipasi sebagai cara dipandang dalam jangka pendek. Berbeda dengan partisipasi yang sebagai tujuan, dimana bentuk partisipasi dipandang dalam proses jangka panjang dan partisipasi fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk benar-benar berpartisipasi, dan menjamin untuk meningkatkan dan memberdayakan rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa bentuk partisipasi sebagai tujuan lebih melibatkan masyarakat secara penuh dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah serta mendukung dalam memberdayakannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Berbeda dengan partisipasi sebagai cara dimana masyarakat dilibatkan untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dan didamping oleh pemerintah, partisipasi masyarakat disini bersifat pasif.

Partisipasi merupakan peran sese/kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk tindakan secara fisik (Slamet, 1994).

Beberapa pendapat dari para teoritis yang disebut oleh (Chambers, 2005) terkait bagaimana tingkat masyarakat berpartisipasi yaitu diantaranya menurut (Arnstein, 1969), (Kanji & Greenwood, 2001), (VeneKlasen & Miller, 2007). Dimana yang menjadi goal dalam pemikiran beberapa teoritis ini adalah partisipasi masyarakat yaitu timbulnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri. Adapun tingkat Partisipasi Masyarakat yaitu :

Tabel 2.1
Model Partisipasi Masyarakat Menurut Para Teoritis

Menurut Arnstein	Menurut Kanji & Greenwood	Menurut Veneklasen & Miller
Citizen Control	Collective Action	Self-Mobilization
Delegated Power	Co - Learning	Iterative Participation
Partnership	Cooperation	Functional Participation
Placation	Consultation	Participation for Material Incentives
Consultation	Compliance	Participation by Consultation
Informing		Passive Participation
Therapy		Token Participation of Manipulation
Manipulation		

Sumber : (Arnstein, 1969), (Kanji & Greenwood, 2001), (Veneklasen & Miller, 2007) diolah

Tingkat partisipasi masyarakat bisa direncanakan atau disesuaikan dengan kondisi dan keadaan tergantung dari konteks dan kebutuhan. Dari model tingkat partisipasi diatas tidak ada yang menegaskan maupun yang mengklaim bahwa model partisipasi masyarakat diatas sebagai satu-satunya model yang benar dan otoritatif. Tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan partisipasi bisa digunakan dalam kegiatan maupun dalam hubungan yang berbeda.

Ada 8 tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Tingkat Partisipasi dari tertinggi ke rendah menurut pernyataan (Arnstein, 1969) dikutip dalam (Wijaksono, 2013) yaitu :

- a. *Citizen Control*, masyarakat bisa secara langsung bertindak sebagai pengendali keputusan serta memiliki wewenang untuk mengadakan negosiasi dengan pihak luar. Pada tingkat ini masyarakat memiliki

kekuatan untuk mengatur program/kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya.

- b. *Delegated Power*, masyarakat pada tingkatan ini diberikan limpahan wewenang untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, mengadakan negosiasi dengan pihak luar (masyarakat) tanpa diktator atau tekanan oleh pemerintah.
- c. *Partnership*, pada tingkatan ini masyarakat dan pemerintah membagi tanggungjawab dalam perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.
- d. *Placation*, pemerintah (pemegang kekuasaan) mempunyai hak untuk menunjuk yang bagian dari masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam akses pengambilan keputusan untuk menjadi anggota suatu badan publik.
- e. *Consultation*, pada tingkatan ini masyarakat diberi ruang/kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, tetapi pendapat masyarakat tersebut tidak dijamin dapat dipertimbangkan. Metode ini sering digunakan sebagai survei tentang arah pikiran masyarakat.
- f. *Informing*, pada tingkatan ini masyarakat hanya menerima informasi dari pemegang kekuasaan dan informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan. Masyarakat hanya memiliki sedikit peluang untuk mempengaruhi susunan perencanaan tersebut.
- g. *Therapy*, masyarakat disini dibuat pura-pura ikut oleh pemerintah sebagai alasan untuk memperkuat proposal yang telah disusun oleh pemerintah.

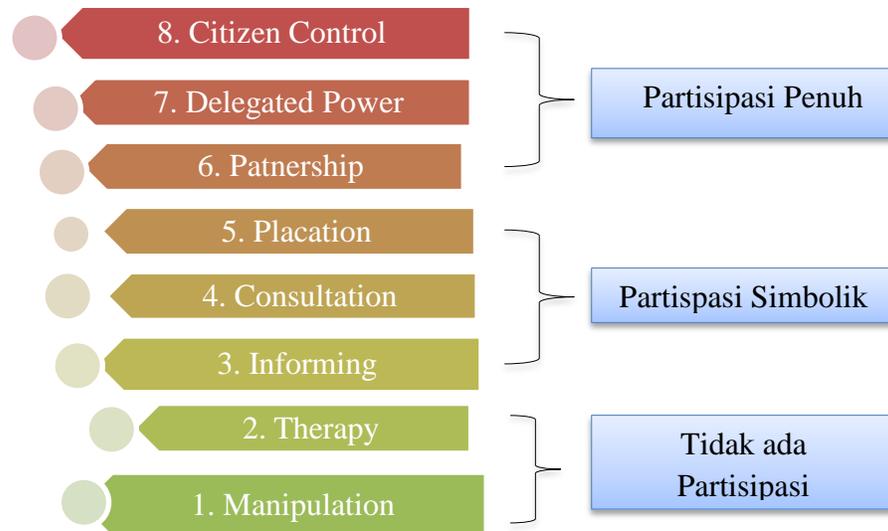
Meskipun masyarakat telah memberikan masukan tetapi pemerintah mengabaikan masukan tersebut, karena tujuan pemerintah disini yaitu untuk mengubah pola pikir masyarakat.

- h. Manipulation*, tingkat partisipasi yang terendah, pada partisipasi ini masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah dalam memanipulasi informasi dan memperoleh dukungan publik dengan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun hal tersebut tidak dilakukan.

Dari rincian penjelasan terkait tingkatan bentuk partisipasi masyarakat diatas, Arnstein membagi dalam 3 kelompok besar bentuk partisipasi yaitu, bentuk partisipasi masyarakat tidak ada meliputi *Manipulation, Therapy*, bentuk partisipasi masyarakat bersifat Simbolik meliputi *Consultation, Informing, Placation*), bentuk partisipasi masyarakat bersifat penuh meliputi *Citizen, Control Delegated Power, Patnership*.

Tingkat partisipasi masyarakat diatas, disusun dari yang tertinggi sampai yang terendah. Adanya tahapan atau tangga partisipasi masyarakat yakni sebagai jenjang partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan nyata. Dimana masyarakat akan melewati tangga yang pertama sampai delapan merupakan bentuk partisipasi. Pertama dan kedua yaitu manipulasi dan terapi. Pada tahap ini, masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah untuk memperoleh dukungan politik. Sasaran dari kedua tahapan ini adalah untuk mendidik dan

mengobati masyarakat yang berpartisipasi. Pada tahap selanjutnya yaitu tangga ketiga, keempat dan kelima, masyarakat mulai diperkenankan untuk ikut menghadiri langsung program pemerintah dan mengemukakan pendapat, tetapi disini masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat memiliki sedikit bahkan hampir tidak mempunyai peluang bahwa pendapat mereka akan dapat mempengaruhi keputusan atau program yang telah disusun oleh pemerintah. Terakhir tiga tangga yang paling tertinggi, pada tangga ini masyarakat memiliki wewenang dalam mengambil keputusan dan bernegosiasi langsung dengan pihak luar. Pada tahap ini pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk ikut andil dalam program-program pemerintah.



Gambar 2. 1
Kelompok Bentuk Partisipasi Masyarakat

Dari delapan tangga partisipasi masyarakat pada gambar 2.1 diatas, memberikan pemahaman bahwa posisi/partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kesulitan isu-isu, permasalahan yang hendak diselesaikan oleh pemerintah. Masyarakat dianggap benar-benar ikut berpartisipasi dalam pembangunan apabila masyarakat ikut serta dan memberikan andil secara utuh baik secara fisik maupun mental emosi, tidak hanya sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap kegiatan tersebut. Adanya rasa tanggungjawab dari dalam diri masyarakat merupakan suatu unsur bentuk partisipasi. Rasa tanggungjawab tersebut akan mendorong individu masyarakat untuk menentukan keputusan terhadap kegiatan pembangunan tersebut.

C. Pembangunan Desa

Desa secara historis merupakan suatu cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa terbentuk. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 terkait desa.

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan mandiri serta demokratis, agar

menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Masyarakat telah diberi kepercayaan dan wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan sebagaimana yang telah tertera dalam PP No.47 tahun 2015. Hal tersebut memberikan peluang desa untuk otonom daerah pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya perekonomiannya.

Pembangunan desa merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik, baik dalam memperbaiki maupun membangun sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan desa, pembangunan/memperbaiki prasarana jalan desa ini telah memberikan pemanfaatan bagi masyarakat seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertanian dan lain sebagainya. Pembangunan fisik ini telah banyak dilakukan dan memberikan hasil nyata secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan bukan hanya kalangan-kalangan tertentu yang dapat merasakan hasil proyek tersebut. Padahal jika masyarakat dapat langsung melibatkan diri dalam proyek tersebut masyarakat telah memberikan partisipasinya dalam mensukseskan program desa dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Adanya berbagai program pembangunan desa merupakan wujud dari pembangunan desa yang bertujuan untuk menciptakan kemajuan desa. Program tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik saja, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk lebih mandiri. Oleh sebab itu, pembangunan desa tidak semata-mata dalam pembangunan fisik saja

tapi bisa juga dalam bentuk yang nonfisik seperti perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan serta permasalahan dan menyusun perencanaan serta mencari solusi dari permasalahan untuk memenuhi kebutuhan.

Tujuan dari pembangunan yaitu untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang menjadi alasan utama diproklamasikan kemerdekaan Indonesia (Siagian, 2005). Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan dari pembangunan maka diperlukan strategi pembangunan. Strategi pembangunan desa sendiri dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, sedangkan untuk sasaran atau target merupakan hasil yang diharapkan atas adanya suatu program atau *output* yang diharapkan dari suatu kegiatan (Sumpeno, 2011).

Terdapat tujuh strategi terpadu dan menyeluruh dalam mengembangkan pembangunan desa menurut (Adisasmita, 2006) yakni :

1. Pertumbuhan, persamaan, kesajahteraan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan tujuan utamanya.
2. Membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah sebagai sasarannya.
3. Masyarakat yang beragam dan beraneka serta kompleks merupakan lingkupnya.

4. Koordinasi yang beraneka ragam baik permanen maupun sementara di semua tingkatan, fungsi kebutuhan dan mekanismenya sebagai bentuk koordinasinya.
5. Arus komunikasi dua arah yang dilakukan secara formal, informal, vertikal, horisontal, diagonal dan berkesinambungan melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang persuasif dan edukatif.
6. Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan *monitoring* kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus menerus.
7. Indikator prestasi yang dicapai berdasarkan pada pemecahan masalah pedesaan yang strategis yaitu aspek kependudukan dan berbagai kegiatan yang dilakukan yang diarahkan kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuannya.

D. Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tugasnya (David, 2004). Manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi tersebut. Setiap strategi yang sudah dilakukan selalu memerlukan adanya peninjauan ulang sampai adanya perubahan di masa depan. Salah satu alasan utama mengapa harus adanya peninjauan ulang adalah untuk menjaga suatu kondisi yang dapat merubah suatu organisasi. Peninjauan ulang juga diperlukan untuk mengevaluasi kembali apa yang telah terjadi sebelumnya untuk diperbaiki bersama-sama kedepannya supaya mampu memberikan tingkat efektifitas dan produktifitas pada manajemen strategi terhadap penampilan kinerja organisasi yang berkaitan, (Siagian, 2005).

Manajemen strategi memiliki keterkaitan yang erat hubungannya dengan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menjalankan strategi praktek langsung. Penyusunan strategi dilakukan untuk memahami posisi yang strategis untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan strategi, perencanaan, perumusan dan pemilihan strategi akan lebih baik jika disertai dengan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya ditetapkan oleh organisasi yang berkaitan.

Proses manajemen strategi sangat diperlukan untuk menentukan keadaan organisasi yang berkaitan kedepannya, dimana dalam proses manajemen ada tahap dan proses yang harus dilakukan sebagai landasan atau pedoman bagi organisasi yang berkaitan. Adapun tahapan dari proses manajemen menurut (Wheelen & Hunger, 2003) yaitu :

1. Tahap Pengamatan Lingkungan

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peristiwa, perkembangan dan perubahan lingkungan yang mempengaruhi kondisi organisasi.

2. Tahap Perumusan Strategi

Tahap ini yaitu tahap dimana pemilihan keputusan dalam pemilihan alternatif strategi yang akan digunakan oleh organisasi.

3. Tahap Implementasi Strategi

Merupakan tahap eksekusi atau pelaksanaan strategi yang dirumuskan atau yang telah direncanakan. Tahap ini merupakan proses dimana manajemen merealisasikan strategi dan kebijakan melalui pembangunan program, anggaran dan prosedur (David, 2004).

4. Tahap Evaluasi Strategi dan Pengendalian

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses manajemen strategi, dimana pada tahap ini, melakukan perbandingan hasil yang didapatkan dengan hasil yang diinginkan untuk memberikan timbal balik yang diperlukan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlakukan.

Menurut (David, 2004) ada tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi yaitu :

1. Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini.
2. Mengukur kinerja

3. Melakukan tindakan-tindakan korektif.

Manajemen strategi disini mempunyai peran sekaligus mengharuskan seluruh elemen yang bernaung didalam organisasi tersebut untuk aktif dalam menentukan tujuan dan arah organisasinya kedepan sehingga perusahaan akan lebih mudah mengontrol pengawainya. Peran yang dimaksud adalah manajemen strategi dapat membantu dalam memformulasikan strategi dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan rasional dalam pemilihan strategi yang tepat untuk digunakan sehingga demikian akan menjadikan dari tarik tersendiri bagi pihak luar untuk menggunakan manajemen strategi pada pengambilan keputusan.

Manfaat utama dari manajemen strategis adalah untuk membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Manfaat lainnya dari penerapan manajemen strategi ada dua yaitu manfaat finansial dan manfaat nonfinansial.

- a. Manfaat finansial, yaitu organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi lebih menguntungkan dan berhasil dari pada yang tidak mempunyai konsep manajemen strategi (David, 2013)
- b. Manfaat nonfinansial, adalah :
 1. Memungkinkan identifikasi, pemprioritasan, dan pemanfaatan peluang yang muncul.
 2. Menyediakan pandangan yang objektif tentang persoalan-persoalan manajemen.

3. Merepresentasikan sebuah kerangka kerja untuk aktivitas koordinasi dan kontrol yang lebih baik.
4. Meminimalkan efek-efek dari kondisi dan perubahan yang tidak menguntungkan.
5. Memungkinkan keputusan-keputusan besar yang mampu mendukung tujuan yang telah ditetapkan secara lebih baik, (David, 2011).

Dalam manajemen strategi memiliki tujuan dan arah yang menjadi titik tujuannya, adapun arah dan tujuannya yaitu :

1. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi/perusahaan

Dimana disini manajemen strategi, harus mampu menunjukkan arah dan tujuan organisasi kepada semua pihak. Karena arah dan tujuan yang jelas akan menentukan bagaimana keadaan organisasi/perusahaan kedepannya bahkan akan menentukan berhasil atau gagalnya suatu organisasi atau perusahaan. Dengan arah dan tujuan yang ada organisasi bisa menjadikan hal tersebut sebagai dasar landasan untuk mengendalikan dan mengevaluasi keberhasilan.

2. Membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak

Organisasi/perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak (pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya) yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya organisasi/perusahaan.

3. Mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata

Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian, sehingga dapat memperluas kerangka waktu/berpikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok.

4. Berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas

Tanggung jawab se manajer bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih baik dan efektif, (Suwandiyanto, 2010).

E. Penelitian Terdahulu

Pada tahun 2017 yang lalu (Irawati, Hubies, & Muksin, 2017) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Koperasi Peternak Galur Murni Di Kabupaten Jember”. Pada penelitiannya tersebut menunjukkan hasil bahwa dengan analisis AHP strategi prioritas yang didapatkan untuk mengembangkan koperasi peternak Galur Mandiri adalah : 1) penguatan modal melalui lembaga keuangan, 2) peningkatan kegiatan promosi dengan sosialisasi pentingnya minum susu, 3) diversifikasi produk, dan 4) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta Dinas Peternakan dan Dinas UMKM.

Kemudian (Wati & Madiarsa, 2016) melakukan penelitian terkait “Pengembangan Usaha BUMDes Desa Tanjung dan Depeha” dengan metode PALS (*Participatory Action Learning System*) variabel yang digunakan adalah BUMDes, laporan keuangan, manajemen usaha, administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari penerapan IPTEK adalah pengelolaan administrasi usaha yg berbasis IT dengan hasil program akutansi (*software*) yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra, meningkatkan kemampuan mitra tentang administrasi usaha sesuai standar akutansi, sehingga dengan *Software* mampu menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan cermat, Mitra mampu mengelola usaha dengan baik, memiliki perencanaan usaha yang jelas.

Berbeda namun masih terkait Badan Usaha Milik Desa yaitu mengenai “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta” yang dilakukan oleh (Zulkarnaen, 2016) dengan variabel penelitian pendirian BUMDes, PKM, potensi, dan data yang digunakan adalah data primer. Hasil dari penelitiannya adalah desa Parakan Salam memiliki potensi dalam mendirikan BUMDes. Melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada dimasyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.

Masih meneliti tentang tema yang sama yaitu mengenai BUMDes tetapi (Yudiardi, 2015) melakukan penelitian yang berfokus terkait “Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian

Masyarakat pedesaan kabupaten Garut” dengan variabel penelitian yaitu aspek informasi, kelembagaan, ekonomi, dan manajemen strategi dan pengembangan ekonomi, yang menggunakan analisis SWOT dan ANP pada penelitiannya. Dan hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa diketahui posisi Badan Usaha Milik Desa pada saat ini yaitu dalam posisi yang baik dan strategi yang dapat diterapkan adalah *grow and build strategic* dan strategi prioritas yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu pembentukan ikatan kerjasama dengan lembaga pengembangan lain. Selanjutnya masih dalam tahun yang sama (Pujiyono & Nugroho, 2016) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pembentukan Koperasi Pertanian Syariah Di Jawa Tengah : Pendekatan Analytical Network Process (ANP)”. Hasil analisis metode ANP menunjukkan bahwa strategi pembentukan koperasi pertanian syariah di Jawa Tengah menghasilkan empat aspek utama, yaitu aspek manajemen, sumber daya manusia, regulasi pemerintah dan sosialisasi. Aspek sumber daya manusia menjadi prioritas utama dengan hasil perbandingan berpasangan (*Pairwise Comparison*) dengan nilai rata-rata sebesar 0,3512, diikuti dengan aspek sumber daya manusia dengan nilai rata-rata 0,2506, aspek sosialisasi dengan nilai rata-rata 0,2037 dan terakhir aspek regulasi pemerintah dengan nilai rata-rata 0,0604. Adapun strategi pembentukan koperasi syariah yang paling tepat untuk diterapkan adalah melalui peningkatan pengelolaan manajemen koperasi dengan nilai rata-rata sebesar 0,3240, diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan nilai rata-rata sebesar 0,3223, peningkatan dukungan regulasi pemerintah dengan nilai rata-rata sebesar

0,2385 dan terakhir peningkatan sosialisasi pentingnya koperasi pertanian syariah dengan nilai rata-rata sebesar 0,1149. Adapun skim pembiayaan yang dapat diberikan secara bertahap dan sesuai dengan permasalahan petani adalah qordul hasan, qord, murabahan bi staman ajal, murabahah, salam/istishna, musyarakah dan mudharabah. Terakhir penelitian yang dilakukan pada tahun yang sama adalah penelitian yang dilakukan oleh (Aggraeni, 2016) yang berjudul “Peranan BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan”. Pada penelitiannya ini Maria menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan *Community Based Research* (CBS) dan hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes membawa perubahan dibidang ekonomi dan sosial namun tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, pada penelitian ini juga ditemukan permasalahan yang muncul terkait BUMDes yakni akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Sandriana, Hakim, & Saleh, 2014) dengan judul “Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Klaster Di Kota Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan untuk menentukan produk unggulan kota Malang adalah (1) produk unik/khas/*trade mark* daerah; (2) sumbangan terhadap perekonomian daerah; (3) pasar; (4) kondisi input (ketersediaan infrastruktur, sdm, teknologi, modal); (5) kemitraan; (6) dukungan kebijakan dan kelembagaan; (7) dampak terhadap lingkungan; (8) tingkat daya saing. Identifikasi produk unggulan daerah berbasis

klaster di Kota Malang dengan metode *Analytical Hierarchy Process* menunjukkan hasil bahwa produk unggulan Kota Malang adalah tempe dan keripik tempe dari sentra Sanan . Strategi yang dipilih untuk mengembangkan sentra tempe dan keripik tempe Sanan adalah strategi SO yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang atau strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (*Growth oriented Strategy*). Selanjutnya ditahun yang sama (Dewi, 2014) melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.

Pada tahun 2012, (Hayyuna, Partiwu & Mindarti, 2012) meneliti terkait Strategi Manajemen Aset BUMDes dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa strategi manajemen aset BUMDes yaitu dengan mengamati lingkungan, penyusunan strategi, dan evaluasi atau control yang

dilakukan dalam bidang produksi barang maupun jasa agar mendorong peningkatan BUMDes.

Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (Suhartono, 2011) mengenai strategi pengembangan koperasi berorientasi bisnis dengan melibatkan beberapa variabel diantaranya pengembangan memitran usaha dan pengembangan kewirausahaan dan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa program unggulan yang dikembangkan sebagai ujung tombak untuk mempercepat pengembangan koperasi dilakukan melalui pengembangan kemitran usaha serta melalui gerakan kewirausahaan. Kedua program ini tentunya membutuhkan partisipasi yang luas dari seluruh lapisan masyarakat termasuk para pengusaha dan dunia pendidikan.

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian Terdahulu & Penelitian Sekarang
1.	Dany Alifah Irawati, Mysa Hubeis, dkk (2017) Strategi Pengembangan Koperasi Peternak Galur Murni Di Kabupaten Jember	Aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek dampak sosial dan lingkungan, aspek hokum, dan aspek ekonomi	<i>Analytic Hierarki Process (AHP)</i>	Hasil analisis AHP, strategi adalah penguatan modal melalui lembaga keuangan, peningkatan kegiatan promosi dengan sosialisasi pentingnya minum susu, diversifikasi produk, dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta Dinas Peternakan dan Dinas UMKM.	1. Penelitian terdahulu mencari prioritas strategi dalam pengembangan koperasi peternak, sedangkan penelitian yang sekarang mencari prioritas strategi dalam pengembangan BUMDes. 2. Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu ada 6 aspek, dari 6 aspek tersebut diantaranya ada yang berbeda, sedangkan penelitian sekarang ada 4 aspek. Dan variabel yang sama adalah aspek manajemen dan aspek ekonomi.
2.	Ni Putu Sri Wati, dkk, (2016), Pengembangan Usaha BUMDes Desa Tanjungng dan Depeha,	BUMDes, administrasi, Manajemen Usaha	<i>Participatory Action Learning System (PALS)</i>	Bahwa dari penerapan Ipteks adalah pengelolaan administrasi usaha yg berbasis IT dengna hasil program akutansi (<i>software</i>) yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra, Meningkatkan kemampuan mitra tentang administrasi usaha sesuai standar akutansi, sehingga dengan <i>Software</i> mampu menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan	1. Penelitian terdahulu mencari cara dalam pengembangan usaha BUMDes Desa Tanjungng dan Depeha, sedangkan penelitian yang sekarang mencari prioritas strategi dalam pengembangan BUMDes. 2. Varibel yang digunakan oleh penelitian penelitian terdahulu ada 2 aspek, sedangkan penelitian sekarang ada 4 aspek. Dan varibel yang sama adalah aspek administrasi dan manajemen. 3. Metode yang digunakan peneliti

				cermat, Mitra mampu mengelola usaha dengan baik, memiliki perencanaan usaha yang jelas.	terdahulu adalah PALS (<i>Participatory Action Learning System</i>), sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode <i>Analytic Hierarki Process</i> (AHP).
3.	Reza M. Zulkarnaen, (2016), Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta	Pendirian BUMDes, PKM, Potensi, ekonomi	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Desa Parakan Salam memiliki potensi dalam mendirikan BUMDes. Melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada dimasyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu fokus penelitian pada Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan penelitian yang sekarang mencari prioritas strategi dalam pengembangan BUMDes. 2. Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama ada 4 aspek, dari aspek tersebut diantaranya ada aspek yang berbeda dengan penelitian yang sekarang yaitu pendirian BUMDes, PKM, Potensi. Dan variabel yang sama adalah aspek ekonomi. 3. Metode yang digunakan peneliti terdahulu adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode <i>Analytic Hierarki Process</i> (AHP).
4.	Dodi Yudiardi, Strategi Pengembangan Badan Usaha	Informasi, Kelembagaan, Ekonomi, dan Manajemen	<i>Strength Weakness Opportunit and Threat</i>	Bahwa diketahui posisi Badan Usaha Milik Desa pada saat ini yaitu dalam posisi yang baik dan strategi yang dapat	1. Penelitian terdahulu studi kasusnya dalam lingkup kabupaten, sedangkan penelitian yang sekarang dalam lingkup desa.

	Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan Kabupaten Garut, (2015),		(SWOT) & <i>Analytical Network Process</i> (ANP)	diterapkan adalah <i>grow and build strategic</i> dan strategi prioritas yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu pembentukan ikatan kerjasama dengan lembaga pengembangan lain.	2. Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu sama-sama ada 4 aspek, dari aspek tersebut diantaranya ada yang berbeda dengan penelitian yang sekarang. Dan variabel yang sama adalah aspek manajemen dan aspek ekonomi. 3. Metode yang digunakan peneliti terdahulu adalah SWOT dan <i>Analytical Network Process</i> (ANP), sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode <i>Analytical Hierarki Process</i> (AHP).
5.	Arif Pujiyono dan Hari Susanto Nugraha (2016), Strategi Pembentukan Koperasi Pertanian Syariah Di Jawa Tengah : Pendekatan <i>Analytical Network Process</i> (ANP).	Aspek SDM, aspek manajemen, aspek sosialisasi, dan aspek regulasi	<i>Analytical Network Process</i> (ANP)	Hasil analisis metode ANP menunjukkan bahwa strategi pembentukan koperasi pertanian syariah dengan melalui peningkatan pengelolaan manajemen koperasi dengan nilai rata-rata sebesar 0,3240, diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan nilai rata-rata sebesar 0,3223, peningkatan dukungan regulasi pemerintah dengan nilai rata-rata sebesar 0,2385 dan terakhir peningkatan sosialisasi pentingnya koperasi pertanian syariah dengan nilai rata-rata sebesar 0,1149.	1. Penelitian terdahulu mencari prioritas strategi dalam pembentukan koperasi pertanian syariah, sedangkan penelitian yang sekarang mencari prioritas strategi dalam pengembangan BUMDes. 2. Variabel yang digunakan penelitian terdahulu ada 4 variabel, dari 4 variabel tersebut ada yang berbeda dengan penelitian sekarang adalah ada 3 variabel, dan yang sama adalah variabel aspek manajemen. 3. Metode peneliti terdahulu menggunakan metode ANP sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode AHP.

6.	Maria Rosa Ratna S. A (2016), Peranan BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	BUMDes, <i>Community Based Research</i> , Desa	Kualitatif dengan Pendekatan <i>Community Based Research</i> (CBS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan keberadaan BUMDes membawa perubahan dibidang ekonomi dan sosial. 2. Keberadaaan BUMDes tidak membawa maanfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung. 3. Ditemukan permasalahan terkait BUMDes yaitu akses masyarakat terhadap air dan untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes masih sulit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu fokus penelitian pada Peranan BUMDes pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan, sedangkan penelitian yang sekarang mencari prioritas strategi dalam pengembangan BUMDes. 2. Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian sekarang semua berbeda, yang sama adalah sama membahas mengenai BUMDes dan peran BUMDes 3. Metode yang digunakan peneliti terdahulu adalah Kualitatif dengan Pendekatan <i>Community Based Research</i>, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode <i>Analytic Hierarki Process</i> (AHP).
7.	Niska Sandrina, Abdul Hakim, dkk (2014), Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Klaster Di Kota Malang	Permodalan Teknologi, Kemitraan, Lingkungan, Nilai Produksi, Ekonomi daerah Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, Daya Saing, Nilai Tambah,	Analisis SWOT dan <i>Analytic Hierarki Process</i> (AHP)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan untuk menentukan produk unggulan kota Malang. Identifikasi produk unggulan daerah berbasis klaster di Kota Malang dengan metode <i>Analythical Hierarchy Process</i> menunjukkan hasil bahwa produk unggulan Kota Malang adalah tempe dan keripik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu mencari strategi dalam pengembangan produk unggulan, sedangkan penelitian yang sekarang mencari prioritas strategi dalam pengembangan BUMDes. 2. Penelitian terdahulu menggunakan metode tambahan yaitu SWOT, sedangkan penelitian yang sekarang hanya menggunakan metode AHP. 3. Variabel yang digunakan penelitian terdahulu ada 21 variabel, dari 21 variabel ada 19 variabel yang

		Pemerataan, Geografis, <i>Profitability</i> , Kemampuan sebaran, Nilai Produksi, Manajemen, Syabilitas Harga, Kebijakan, Sosial, Bahan Baku, Ciri khas, Pasar, dan Tenaga Kerja		tempe dari sentra Sanan . Strategi yang dipilih untuk mengembangkan sentra tempe dan keripik tempe Sanan adalah strategi SO yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang atau strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (<i>Growth oriented Strategy</i>).	berbeda dengan penelitian yang sekarang, sedangkan variabel yang sama adalah manajemen dan ekonomi
8.	Amelia Sri Kusuma Dewi (2014), Peranan BUMDes sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menumbuhkan perekonomian desa	BUMDEs, Ekonomi Pedesaan, Badan Hukum	Analisis deskriptif	Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu fokus pada Peranan BUMDes sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menumbuhkan perekonomian desa, sedangkan penelitian yang sekarang mencari prioritas strategi dalam pengembangan BUMDes. 2. Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian sekarang berbeda namun sama membahas mengenai BUMDes dan ekonomi desa. 3. Metode yang digunakan peneliti terdahulu adalah Analisis deskriptif, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode

				menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.	<i>Analytic Hierarki Process (AHP).</i>
9.	Rizka Hayyuna,dkk, (2013) Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa.	Manajemen Aset, BUMDes, Pendapatan Desa	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen aset BUMDes yaitu dengan mengamati lingkungan, penyusunan strategi, dan evaluasi atau control yang dilakukan dalam bidang produksi barang maupun jasa agar mendorong peningkatan BUMDes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu berfokus pada prioritas Strategi manajemen aset BUMDes dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, sedangkan penelitian yang sekarang mencari prioritas strategi dalam pengembangan BUMDes. 2. Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu ada 3 aspek sedangkan penelitian sekarang ada 4 aspek, beda variabel dengan penelitian terdahulu adalah Faktor pendukung dan penghambat BUMDes dan pendapatan desa. Dan variabel yang sama adalah aspek manajemen. 3. Metode yang digunakan peneliti terdahulu adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode <i>Analytic Hierarki Process (AHP).</i>
10.	Iman Suhartono (2011), Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi	Pengembangan mitraan usaha, pengembangan kewirausahaan	Analisis deskriptif	1. Pengembangan kemitraan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam memperbaiki peluang bagi peningkatan kemampuan koperasi melalui transfer	1. Penelitian terdahulu fokus pada Strategi pengembangan koperasi berorientasi bisnis, sedangkan penelitian yang sekarang mencari prioritas strategi dalam pengembangan BUMDes.

	Bisnis			<p>teknologi, keterampilan teknis dan manajemen, serta sumber daya lainnya yang memungkinkan koperasi berkembang menjadi badan usaha yang tangguh.</p> <p>2. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan ini dapat berhasil dan berdaya guna serta menjadi milik masyarakat, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait di samping partisipasi masyarakat secara luas termasuk dari kalangan perguruan tinggi serta dukungan dunia usaha sesuai dengan kewenangannya masing-masing.</p>	<p>2. Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama penelitian yang sekarang lebih variabel yang digunakan lebih banyak.</p> <p>3. Metode yang digunakan peneliti terdahulu adalah Analisis deskriptif, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode <i>Analytic Hierarki Process</i> (AHP).</p>
--	--------	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

BUMDes adalah suatu lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak luar atau tertentu, BUMDes dikelola dari desa oleh desa untuk desa, dengan cara mengembangkan potensi yang di miliki oleh desa dan dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Output yang dihasilkan oleh BUMDes akan kembaliikmati oleh masyarakat serta pemerintah desa itu sendiri atau dalam arti lain untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Untuk mengetahui strategi yang tepat untuk pengembangan BUMDes Mekar Jaya diperlukan analisis strategi yang diprioritas oleh pengelola BUMDes, kemudian barulah dirumuskan alternatif kebijakan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dalam menentukan alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode analisis hiraerki proses (AHP).

Berdasarkan hasil survei dan diskusi yang dilakukan dengan para responden utama dari pengelola BUMDes Mekar Jaya, dapat dirumuskan berbagai alternatif kebijakan dari 4 kriteria yaitu aspek administrasi, aspek manajemen, aspek ekonomi dan aspek pelyanan. Berikut kriteria dan alternatif-alternatif antara lain yaitu :

1. Aspek Administrasi

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola bumdes dalam bidang administrasi
- b. Mengadakan pembukuan berbasis teknologi (IT)
- c. Mengadakan pelatihan pembukuan berbasis teknologi (IT)

2. Aspek Manajemen

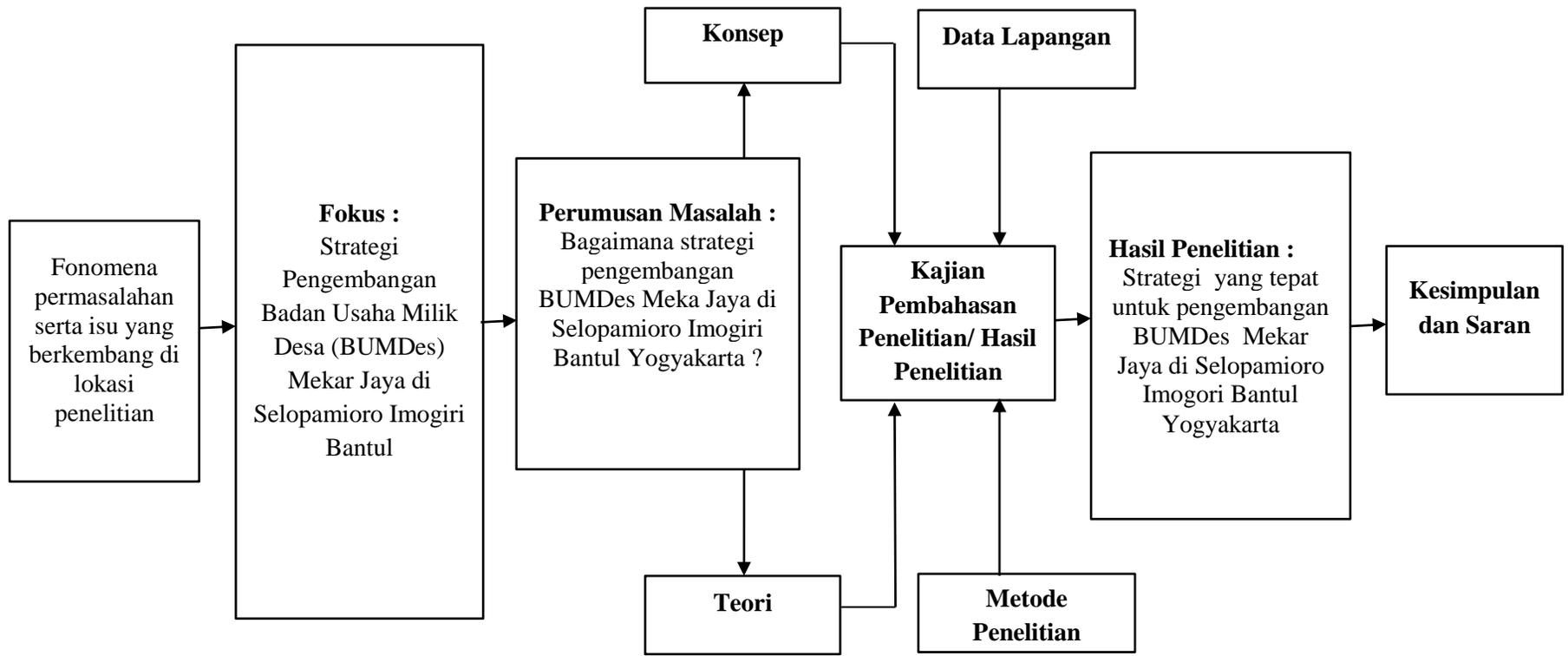
- a. Pengadaan sumber tenaga ahli
- b. Melakukan studi banding ke BUMDes Lain
- c. Mengadakan pelatihan untuk pengelola BUMDes
- d. Memperbaiki kinerja BUMDes
- e. Optimalisasi kinerja BUMDes

3. Aspek ekonomi

- a. Pembentukan usaha kemitraan dengan pihak lain (kerjasama)
- b. Penyediaan pusat pemasaran terpadu untuk industri rumah tangga
- c. Pengembangan industri rumah tangga

1. Aspek Pelayanan

- a. Pendirian pusat pelayanan informasi BUMDes
- b. Mengoptimalkan fungsi pelayanan informasi bisnis BUMDes
- c. Meningkatkan kemudahan bisnis BUMDes untuk diakses
- d. Meningkatkan kecepatan tanggapan BUMDes dalam pelayanan



Sumber : Jurnal penelitian terdahulu, diolah 2018

Gambar 2. 2
Alur Kerangka Pemikiran